LAMPIRAN I

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

NOMOR: **26 5** TAHUN 2025

DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2025

A. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN SETIAP SAAT

SEKRETARIAT

			Pejabat Yang	Penanggung Jawab	Waktu	Format	Informasi Ya	ng Tersedia	Jangka Waktu	Jenis Media Yang Memuat
No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Menguasai Informasi	Pembuatan Informasi	Pembuatan Informasi	Cetak	Rekam	Online	Penyimpanan	Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dokumen Renstra	a. Informasi tentang organisasi, administrasi, dan Kepegawaian	Kepala Dinas	Kasubag. Umum dan Kepegawaian	Setiap ada perubahan	V	-	V	2 Tahun Setelah Perubahan	
1	Tahun 2021-2026	b. Rencana Strategis Perubahan 2021-2026	Kepala Dinas	Sekretariat / Perencanaan	Setiap ada perubahan	V	-	V	5 Tahun	
2	kehijakan yang telah	Peraturan, Perundang undangan ketenagakerjaan dan keputusan keputusan Kepala Dinas.	Kepala Dinas		Setiap ada perubahan	V	-	V	Selama berlaku	Website Disnaker
3	ketenagakerjaan	a. Informasi lowongan pekerjaan b. Informasi pembukaan pelatihan berbasis kompetensi	Kepala Dinas	Sekretariat	Update setiap ada perubahan	V	-	V	Selama berlaku	https://disnakerwonogiri.id/
4	Dokumen Renja Tahun 2024, 2025	Rencana Kerja Tahunan Disnakerin	Kepala Dinas	,	Setiap ada perubahan	V	-	V	2 Tahun	
5	Dokumen Laporan Kinerja Instansi	a. Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Perencanaan	Tahunan	V	-	V	1 (satu) Tahun	
	Pemerintah (I KiIP)	b. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	Kepala Dinas	Sekretariat / Perencanaan	Tahunan	V	-	V	1 (satu) Tahun	

BIDANG HUBUNGAN INDUSTRIAL DAN KESEJAHTERAAN TENAGA KERJA (HI & KTK)

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai	Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan	Format Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu	Jenis Media Yang Memuat
No.	oems informasi	THE BOOM IS THOUSE (1 CTIME)	Informasi	Pembuatan Informasi	Informasi	Cetak	Rekam	Online	Penyimpanan	Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Laporan Akhir Kegiatan	a. Laporan hasil kerjasama Tripartit	Kabid. HI & KTK	Kabid. HI & KTK	Setiap Tahun	V	-	-	1 (satu) Tahun	
1		b. Laporan Kegiatan Pembinaan dan Pengupahan	Kabid. HI & KTK	Kabid. HI & KTK	Setiap Tahun	V	-	-	1 (satu) Tahun	
		c. Laporan Sosialisasi Upah Minimum Kabupaten	Kabid. HI & KTK	Kabid. HI & KTK	Setiap Tahun	V	-	-	1 (satu) Tahun	Website Disnaker https://disnakerwonogiri.id/

Dokumen Baporan	a. Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Kabid. HI & KTK	Tahunan	V	-	V	1 (Satu) Tahun
Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Bidang	Kepala Dinas	Kabid. HI & KTK	Tahunan	V	-	V	1 (Satu) Tahun

BIDANG PELATIHAN PRODUKTIVITAS PENEMPATAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI (PPPTKT)

			Pejabat Yang	Penanggung Jawab	Waktu	Format	Informasi Ya	ng Tersedia	Jangka Waktu	Jenis Media Yang Memuat
No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Menguasai Informasi	Pembuatan Informasi	Pembuatan Informasi	Cetak	Rekam	Online	Penyimpanan	Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Data IPK	Informasi Pasar Kerja, Pencaker, Lowongan Kerja, Penempatan Tenaga Kerja dan Informasi seputar Job Fair Virtual Kabupaten Wonogiri	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	v	-	-	1 (satu) Tahun	
2	BPS	Data Pengganggur, Angkatan Kerja, TPT, TPAK Kab. Wonogiri	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	-	1 (satu) Tahun	
3	Data Registrasi dan Keberangkatan PMI	Laporan Registrasi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) dan Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang Berangkat ke Negara Tujuan	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	v	-	-	1 (satu) Tahun	Website Disnaker https://disnakerwonogiri.id/
4	Data Tenaga Kerja Asing	Laporan Keberadaan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Wonogiri	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	-	1 (satu) Tahun	
5	Dokumen Laporan	Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	v	1 (satu) Tahun	
	Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Bidang	Kepala Dinas	Kabid. PPPTKT	Tahunan	v	-	v	1 (satu) Tahun	
6	Laporan Monitoring Kegiatan	Laporan Monitoring Pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Tenaga Kerja di Lembaga LPKS dan LPKP	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	-	1 (satu) Tahun	
7	Data Sertifikasi	Data Sertifikasi dan Uji Kompetensi Tenaga Kerja Lulusan LPK dan BLK	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	-	1 (satu) Tahun	Website Disnaker
8	Laporan Kegiatan Penyuluhan	Laporan Penyuluhan Kepada Masyarakat	Kabid. PPPTKT	Kabid. PPPTKT	Tahunan	V	-	-	1 (satu) Tahun	https://disnakerwonogiri.id/
	Dokumen Laporan	Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Kabid. PPPTKT	Tahunan	v	-	V	1 (satu) Tahun	
	9 Kinerja Instansi	Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Bidang	Kepala Dinas	Kabid. PPPTKT	Tahunan	v	-	v	1 (satu) Tahun	

BIDANG PERINDUSTRIAN

	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai Informasi	Penanggung Jawab Pembuatan Informasi	Waktu Pembuatan Informasi	Format Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu	Jenis Media Yang Memuat
No.						Cetak	Rekam	Online	Penyimpanan	Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Kepala Dinas	Kabid	Setiap ada					

2		Informasi Keberadaan Sentra Industri Kecil Menengah		Perindustrian	perubahan	V		V	1 (satu) Tahun	Website Disnaker
3	Dokumen Laporan Kinerja Instansi	a. Ringkasan Informasi Kinerja	Kepala Dinas	Kabid Perindustrian	Tahunan	V	-	V	1 (satu) Tahun	https://disnakerwonogiri.id/
	Pemerintah (LKjIP)	b. Laporan Hasil Pelaksanaan Kinerja Bidang	Kepala Dinas		Tahunan	V	-	V	1 (satu) Tahun	

UPTD BLK WONOGIRI

No.	Jenis Informasi	Ringkasan Isi Informasi (Perihal)	Pejabat Yang Menguasai	Penanggung Jawab	Waktu Pembuatan	Format Informasi Yang Tersedia			Jangka Waktu	Jenis Media Yang Memuat
.,,			Informasi	Pembuatan Informasi	Informasi	Cetak	Rekam	Online	Penyimpanan	Informasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Informasi Profil BLK									
а		Visi dan Misi	Ka. UPTD BLK	Kusubbag Tata Usaha	2021	V	=	V	Selama berlaku	
b		Struktur Organisasi	Ka. UPTD BLK	Kusubbag Tata Usaha	Update 2024	V	-	V	Selama berlaku	Website UPTD BLK Wonogiri
С		Jenis Kejuruan Pelatihan	Ka. UPTD BLK	Kusubbag Tata Usaha	Update 2024	V	-	V	Selama berlaku	https://blkwonogiri.com/
d		Tugas, Wewenang dan Fungsi	Ka. UPTD BLK	Kusubbag Tata Usaha	Update 2024	V	-	V	Selama berlaku	

NTAH KANASASA NEGATA DAN PERINDUSTRIAN WONOGIRI.

WIYANTO S.H., M.Si. Antima Utama Muda NIA 19700904 199803 1 009

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI NOMOR: 265

TAHUN 2025

LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI DINAS TENAGA KERJA DAN PERINDUSTRIAN KABUPATEN WONOGIRI

Pada hari ini, jum'at tanggal 21 bulan Februari tahun 2025 bertempat di Dinas Tenaga Kerja Dan Perindustrian Kabupaten Wonogiri telah dilakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik sebagaimana disebutkan pada tabel dibawah ini :

No	Informasi	Dasar Hukum Pengecualian	Konsekuensi/Per	timbangan Bagi Publik	Jangka waktu
MO	informasi	Informasi	Dibuka	Ditutup	Vangaa waxta
1.	Database PNS yang terkait dengan riwayat kesehatan, kekayaan, rekening pribadi, penilaian kinerja, penjatuhan hukuman disiplin PNS, dll.)	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- Mengungkapkan data pribadi PNS - Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak terbatas, kecuali pemilik data mengizinkan.
2.	Dokumen/ Berkas/ Arsip PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	pribadi PNS Melanggar	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	HAM		
3.	Identitas PNS yang melanggar disiplin dan dijatuhi hukuman disiplin	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
4.	Identitas PNS yang mengajukan izin perceraian/perkawinan	KIP Pasal 17 huruf h - UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	Mengungkapkan data pribadi PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
5.	Daftar Nilai DP3/Sasaran Kinerja Pegawai PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H - UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h - PP no. 10 Tahun 1979 tentang penilaian Pelaksana Pekerjaan PNS Pasal 6	- Mengungkapkan data pribadi - PNS Melanggar HAM	Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas

6.	Data Rekam Medis PNS	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	- Mengungkapkan data pribadi	- Melindungi data pribadi PNS yang bersifat rahasia	Tidak Terbatas
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf h	- PNS Dapat Merugikan - PNS Melanggar HAM	- Untuk melindungi keamanan dan kenyamanan PNS	
		269/MENKES/III/ 2008 tentang rekam medis (pasal 10)			
7.	Data usulan pengangkatan PNS dalam jabatan struktural	- UUD Negara RI Tahun 1945 Pasal 28 A s.d 28 H	Mengganggu, menghambat dan merugikan proses	Menjaga kondusifitas, keamanan dan kepastian hukum	Tidak terbatas
		- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara		
		- PP No. 100 Tahun 2000 tentang pengangkatan PNS dalam jabatan struktural Jo. PP No.13 tahun 2002 tentang perubahan atas PP No. 100	prematur		
8.	Arsip Dinamis yang menurut sifatnya rahasia (lelang yang masih berjalan atau kegiatan yang masih berjalan atau belum dipertanggungjawabkan (pemeriksaan/pengawasan)	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i - UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Merugikan proses penyusunan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Melindungi kerahasiaan dokumen	Tidak terbatas
9.	Dokumen penawaran kontrak, ketika masih dalam proses pengadaan barang dan jasa.	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf j - Perpres Nomor 54/2010	Muncul persaingan usaha yang tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Terbatas sampai dengan proses pengadaan barang/jasa
		Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah			
10.	- Laporan Hasil Pemeriksaan Regular	- UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 17 huruf i	Menghambat Kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Tidak Terbatas
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Kasus	- PP No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah			
	- Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus	- PP No. 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah			
	- Review Laporan Keuangan	- Peraturan Menpan No. PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Pengawasan Intern Pemerintah			

- Laporan hasil Pemeriksaan dan/atau pengawasan. a. Laporan Hasil Audit Terhadap Aspek Keuangan Tertentu	Indonesia Nomor 12 Tahun 2017	Berpotensi disalahgunakan oleh	pihak yang tidak	Atas ijin pihak yang melakukan pemeriksaan
b. Laporan Hasil Audit Kinerja		orang yang tidak berkepentingan	berkepentingan	kasus atau atas perintah dari penegak hukum
c. Laporan Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu				
d. Laporan Hasil Review				
e. Laporan Hasil Evaluasi				
f. Laporan Hasil Monitoring				
g. Laporan Hasil Kegiatan Pengawasan lainnya				
h. Laporan Pemberian Jasa Konsultasi Laporan Hasil				

